ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah daerah. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah kecakapan auditor, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari daftar rincian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali periode hingga tahun 2015. Sampel penelitian sebanyak 122 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecakapan profesional auditor berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Sedangkan tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Kata kunci: tindak lanjut hasil pemeriksaan, rekomendasi, kecakapan profesional auditor, tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, lama masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, pengawasan legislatif.